



# LAPORAN

# KINERJA

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Triwulan II  
**2025**

# TIM PENYUSUN

## Penanggung Jawab

**Joni Haryadi D**

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)

## Ketua Tim Penyusun

**Gleni Hasan Huwoyon**

Kepala Sub Bagian Umum

## Anggota Tim Penyusun

**Adinda Rizkylia Shahrani**

Sub Koordinator Kelompok Tata Operasional

**Armin Hidayat**

Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha

**Endah Susiyanti**

Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Teknis

## Sekretariat

**Shella Savitri**

Staf Kelompok Tata Operasional

**Yuni Setyowati**

Staf Kelompok Tata Operasional

**Susiyanti**

Staf Kelompok Tata Operasional

**Iswahyudi**

Staf Kelompok Tata Operasional

**Ipan Dahniar**

Staf Kelompok Tata Operasional

## Kontributor

**Ifana Agustina**

Staf Kelompok Tata Usaha (Kepegawaian)

**Dewinta Hesti Widyastantri**

Staf Kelompok Tata Usaha (Keuangan)

**Fitri Rahmawati**

Staf Kelompok Pelayanan Teknis

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat ijin dan rahmat-Nya penyusunan buku "**Laporan Kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Triwulan II Tahun Anggaran 2025**" dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas BRBIH dalam melaksanakan Program Perikanan budidaya ikan hias untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya erat kaitannya terselenggaranya *good governance* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2025 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja TA 2025. Laporan ini sangat penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja organisasi pada Triwulan II TA 2025. Capaian Kinerja ini dapat tercapai berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran pegawai BRBIH baik instuktur, fungsional lain dan personil manajerial. Diharapkan pada tahun 2025 kegiatan-kegiatan yang diamanatkan pada BRBIH dapat terlaksana secara optimal sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2025 ini, atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Kami membuka sekiranya jika ada saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Depok, 21 Juli 2025

KEPALA BRBIH  
  
Joni Haryadi D



# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Keragaan SDM.....	4
E. Sistematika Laporan Kinerja.....	5
F. Potensi dan Permasalahan.....	6
II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Rencana Kerja Tahun 2025.....	13
C. Perjanjian Kinerja.....	15
D. Pengukuran Kinerja.....	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	40
IV. PENUTUP.....	45
A. Capaian Kinerja.....	45
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2025.....	vii
Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias .....	8
Tabel 3. Program BRBIH Tahun 2025 .....	14
Tabel 4. Rincian Revisi DIPA .....	14
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2025.....	15
Tabel 6. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 .....	19
Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator 1 .....	20
Tabel 8. Bobot Nilai IKPA 2025 .....	22
Tabel 9. Kategori Nilai IKPA.....	22
Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator 2.....	23
Tabel 11. Rincian Perbandingan Capaian IK IKPA Triwulan II Tahun 2025 dan 2024 .....	23
Tabel 12. Rincian Komponen Penilaian SAKIP BRBIH .....	26
Tabel 13. Bobot Variabel Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai) .....	26
Tabel 14. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran .....	26
Tabel 15. Capaian Kinerja Indikator 5.....	29
Tabel 16. Capaian IK 6 .....	34
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja 8.....	37
Tabel 18. Pagu dan realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025 .....	41
Tabel 19. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Triwulan II Tahun 2025 .....	41
Tabel 20. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2025.....	42
Tabel 21. Capaian Kinerja BRBIH Triwulan II 2025 .....	46

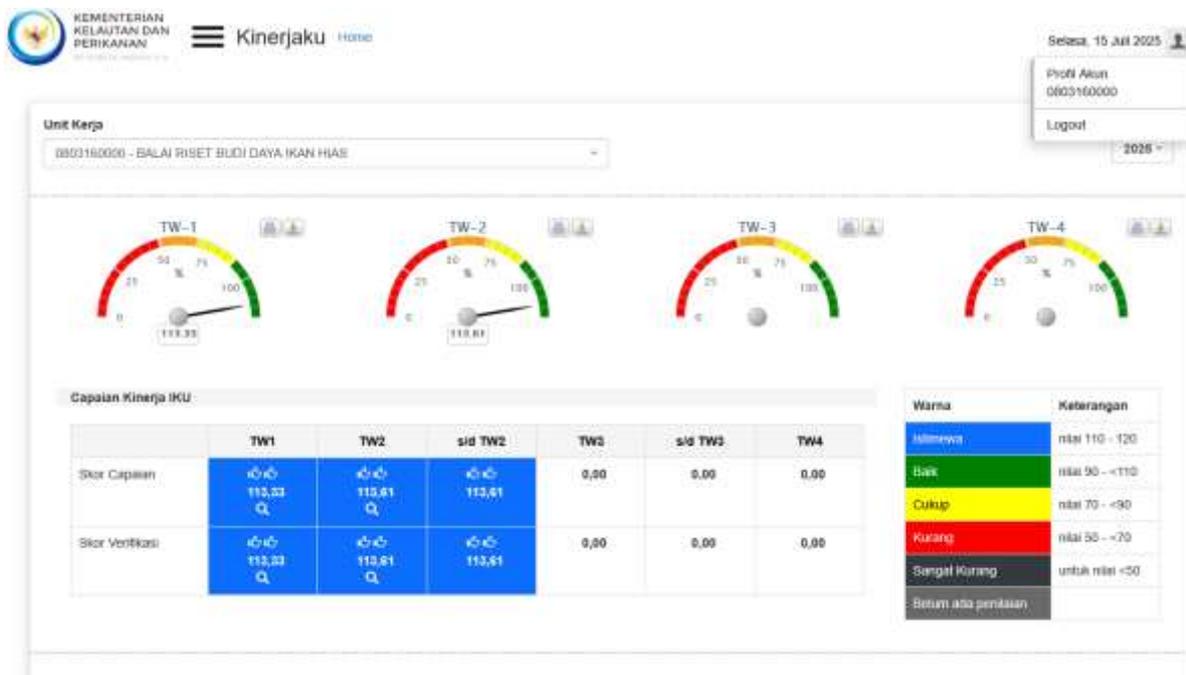
# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard Kinerja Level 3 BRBIH .....	vi
Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH .....	4
Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Triwulan II 2025 .....	4
Gambar 4. Status Indeks capaian IKK .....	16
Gambar 5. <i>Dashboard</i> Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2025 .....	18
Gambar 6. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2025 .....	28
Gambar 7. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025 .....	28
Gambar 8. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025.....	28
Gambar 9. Kategori Nilai IP ASN.....	29
Gambar 10. Rincian Perbandingan Hasil Penilaian IP ASN BRBIH Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Nilai Maksimum berdasarkan Dimensi Penilaian .....	30

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan visi dan misi BRBIH, pada Januari 2025 BRBIH telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) dengan Sekretaris BPPSDMKP. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap Kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja sebanyak 9.

Pengukuran capaian kinerja BRBIH tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2025 sebesar 113,61%, sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 3 BRBIH

Capaian Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2025, diukur untuk 5 indikator kinerja, 2 indikator kinerja dengan status hijau dan 3 indikator kinerja lainnya bernotifikasi biru. Dengan rincian target sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2025

No	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	85	100,00
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	84	100	119,05
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	-	-	-
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	-	-	-
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	81,3	88,62	109,00
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	80	100	120,00
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	-	-	-
		8 Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000	70.000.000	96.874.550	120,00
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	-	-	-

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRBIH pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 3.835.054.694,- atau 34,96% dari pagu anggaran Rp. 10.969.977.000,- (pagu dengan blokir). Jika pagu blokir sebesar Rp. 3.208.461.000,- Tidak diperhitungkan maka persentasenya menjadi 49,41% dari pagu Rp 7.761.516.000,-.

Pada Triwulan II 2025, kinerja BRBIH dapat tergolong baik, namun demikian secara umum masih terdapat permasalahan yang berpotensi untuk menghambat capaian kinerja di triwulan berikutnya, beberapa permasalahan berdasarkan sasaran kinerja utama beserta rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Nilai IP ASN maksimal yang mungkin dicapai sesuai dengan perubahan formula pengukuran IP ASN di tahun 2025 sebesar 88,65 belum tercapai dikarenakan masih ada ASN yang belum memenuhi 20JP pada komponen penilaian kompetensi. Untuk mengantisipasi tidak tercapainya nilai maksimal tersebut, maka direkomendasikan kepada bagian kepegawaian untuk menghimbau ASN BRBIH yang belum memenuhi 20JP untuk mengikuti kegiatan Diklat dan melakukan upload sertifikat Diklat pada website MyASN.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRBIH. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH. Akhirnya, BRBIH berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



# Bab 1

## Pendahuluan

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

### 1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- b) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g) Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

### 2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Balai Riset Budidaya Ikan Hias sebagai salah satu instansi

pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BRBIH dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Laporan Kinerja BRBIH Triwulan I Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BRBIH serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BRBIH guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi BRBIH, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

## **B. Tujuan**

Laporan Kinerja BRBIH merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRBIH untuk meningkatkan kinerja.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, BRBIH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM).

BRBIH mempunyai tugas melaksanakan riset budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut berdasarkan lingkungan fisik, dengan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya ikan hias;

2. Pelaksanaan riset perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut meliputi perbenihan dan sistem, reproduksi, domestikasi dan pemuliaan sumber daya plasma nutfah Ikan hias, nutrisi dan teknologi pakan, sistem ikan, lingkungan, serta teknologi budidaya ikan hias;
3. Pengembangan teknologi perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut;
4. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
5. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut BRBIH di dukung oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagaimana berikut:

a. Subbagian Umum

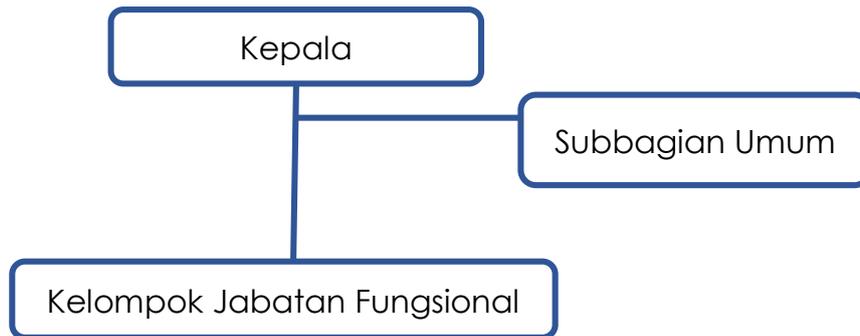
Subbagian umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepala BRBIH dengan tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola

kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

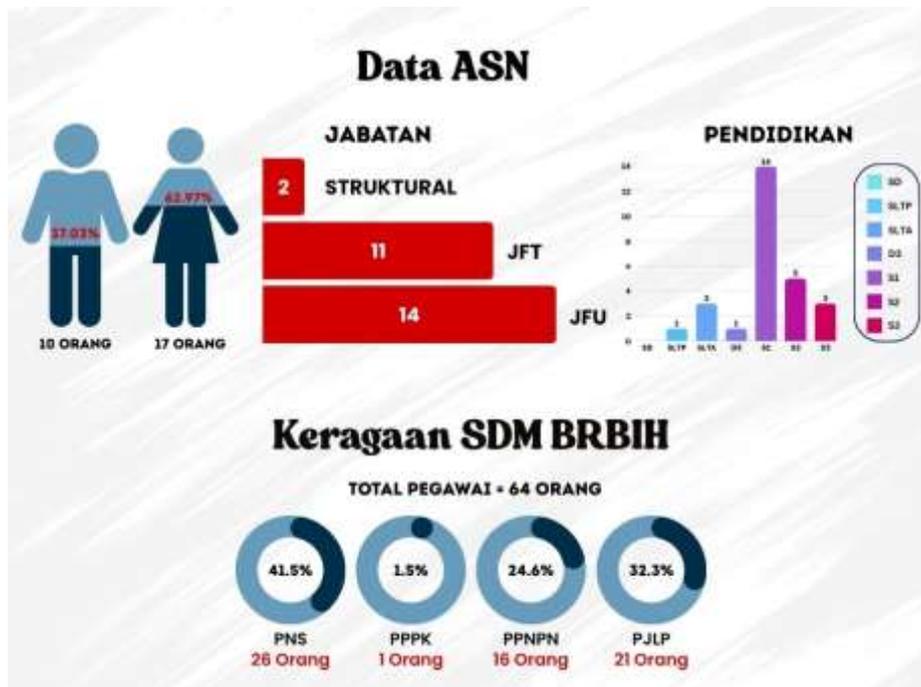
Struktur organisasi BRBIH sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 77/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH

#### D. Keragaan SDM

SDM BRBIH pada triwulan II Tahun 2025 sebanyak 64 orang yang terdiri dari 27 orang dengan status ASN, 16 orang dengan status PPNPN, dan 21 orang dengan status PJLP. Adapun komposisi SDM BRBIH, sebagai berikut:



Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Triwulan II 2025

## E. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

### a. Cover Laporan

### b. Kata Pengantar

Pada bagian ini berisi tentang pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan, dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BRBIH

### c. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama triwulan II Tahun 2025.

### d. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### e. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### f. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

g. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

h. Lampiran

Bab ini berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu

## **F. Potensi dan Permasalahan**

### **a. Potensi**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mendukung pengembangan sektor perikanan, khususnya budidaya ikan hias. SDM di balai ini terdiri dari instruktur, teknisi akuakultur, teknisi lapangan dan tenaga administrasi yang kompeten di bidangnya.

Para instruktur, teknisi akuakultur dan teknisi lapangan di balai riset ini memiliki pengalaman luas dalam teknik budidaya ikan hias, baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi modern. Mereka juga berkompeten dalam manajemen pakan, kualitas air, dan pengendalian penyakit, yang menjadi kunci keberhasilan dalam budidaya ikan hias.

Dengan adanya SDM yang handal, BRBIH turut aktif dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini mendorong terciptanya inovasi dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam budidaya ikan hias.

Tidak hanya itu, BRBIH juga terus mendukung pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku industri untuk meningkatkan keterampilan dalam budidaya ikan hias melalui program pelatihan dan workshop. Dengan keahlian yang

dimiliki, SDM di Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan industri ikan hias Indonesia, menciptakan peluang pasar baru, serta mendukung konservasi spesies ikan hias yang langka dan bernilai ekonomi tinggi.

## **2. Sumber Daya Ikan**

Potensi ikan hias Indonesia tidak hanya bersumber dari air tawar, ikan hias laut juga cukup prospektif untuk dikembangkan, selain dari itu kita sadari bahwa potensi ikan hias akan mengalami eksploitasi yang berlebihan apabila dimanfaatkan secara tidak efisien, tidak dikelola secara arif dan bijaksana dan akhirnya kekurangan persediaan atau bahkan kehilangan spesies. Sebagai pasar ikan hias terbesar di dunia, adanya regulasi pasar ikan hias di Eropa yang mensyaratkan ekspor beberapa komoditas ikan hias harus dari hasil budidaya dapat menjadi peluang dan tantangan yang sangat dibutuhkan guna menembus pasar tersebut.

Melihat hal tersebut maka BRBIH sebagai satker di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak dalam pengembangan budidaya ikan hias tentu saja berpotensi sangat besar untuk mendukung peningkatan produksi nasional. Saat ini, sumberdaya ikan yang masih dibudidayakan di BRBIH terdiri atas ikan hias air tawar dan masih dibudidayakan, diantaranya Ikan Arwana, Koi, Discus dan Platy disamping budidaya komoditas maggot sebagai pakan alternatif. Ikan hias dari hasil samping kegiatan riset beberapa tahun sebelumnya masih terpelihara sebagai ikan koleksi yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi pengunjung yang datang ke BRBIH.

## **3. Sarana dan Prasarana**

Selain potensi berupa SDM dan Sumber Daya Ikan, BRBIH juga memiliki potensi sarana dan prasarana berupa lahan yang dimiliki seluas 12,5 Ha dengan fasilitas yang dapat digunakan untuk

mendukung kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan. Sejak beralihnya fungsi riset di tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian fungsi sarana dan prasarana yang ada dan dikelompokkan ke dalam beberapa cluster, diantaranya cluster loca feed, cluster tanaman hias air dan cluster arwana. Penggunaan lahan untuk fasilitas lainnya masih terus dikembangkan dan dituangkan dalam site plan BRBIH yang disiapkan sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru nantinya. Fasilitas-fasilitas yang tersedia saat ini disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias

NO	FASILITAS	FUNGSI	KEGIATAN
1	Laboratorium Uji	Lab. Genetika	analisa molekuler seperti RAPD, PCR, MHC, Uji KHV
		Lab. Nutrisi	-
		Lab. Kualitas Air	analisa kualitas air dengan berbagai parameter fisika dan kimia seperti Amonia, Nitrit, Nitrat, Suhu, Oksigen Terlarut, pH, Alkalinitas, Kesadahan, TSS, Konduktivitas,
		Lab. Biologi	Budidaya tanaman hias air
		Lab. Pakan Alami	Budidaya pakan alami berupa moina dengan hasil samping cacing beku
2	Hatcheri/ hanggar	Aquatia 1	Budidaya ikan hias platy
		Aquatia 2	Budidaya ikan hias Koi dan Koki
		Aquatia 3	Gedung serba guna
		Aquatia 4	Budidaya discuss dan pemeliharaan ikan koleksi
		Cluster Arwana	Budidaya ikan hias arwana
		Cluster Loca Feed	Budidaya magot dan produksi pakan buatan dengan produk turunan magot
3	Kolam/Bak Pemeliharaan	Kolam Beton	Pemeliharaan Ikan Koi
		Kolam Tanah	Budidaya ikan koi
		Bak Beton	Budidaya ikan platy, pembesaran ikan koki
4	Gedung Penunjang	Gedung Administrasi	Pusat keadministrasian BRBIH
		Gedung Instruktur	Ruang kerja instruktur dan teknisi serta mahasiswa PKL/Magang
		Guest house	Sarana pendukung untuk tamu dan peserta magang, pkl dan penelitian
		Showroom	Sarana untuk menampilkan berbagai jenis ikan hias sebagai sumber edukasi bagi masyarakat
		Musholla	Sarana ibadah umat muslim di lingkungan BRBIH
		Stokist Room	Sarana penyimpanan barang persediaan dan barang operasional perkantoran

## **b. Permasalahan**

Saat ini masalah dan tantangan yang sedang dihadapi BRBIH dalam pelaksanaan program untuk mendukung pembangunan KP diantaranya adalah:

- 1) Beralihnya fungsi riset ke BRIN menyebabkan tugas dan fungsi BRBIH sebagai Balai Riset menjadi tidak relevan lagi untuk saat ini. Belum terbitnya peraturan perundangan perihal Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) akibat peralihan riset mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.
- 2) Terbitnya Keputusan Menteri KP No.54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana layanan uji laboratorium sudah tidak termasuk dalam kategori layanan publik di BPPSDM KP mengakibatkan sarana laboratorium yang dimiliki tidak dapat digunakan sebagai sumber penerimaan PNBPF fungsional.



# Bab 2

## Perencanaan Kinerja

## II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Sebagai satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), BRBIH berperan dalam mendukung Rencana Strategis BPPSDMKP. Visi BPPSDMKP sebagaimana tercantum dalam Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Visi BPPSDMKP sejalan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam Renstra BPPSDMKP dijelaskan bahwa mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan Misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP melaksanakan 2 dari 8 Misi/ Asta Cita KKP yang dirumuskan sebagai berikut :

1. "Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan" yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
2. "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusiain Kelautan dan Perikanan" yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana tercatat dalam Renstra BPPSDMKP, Sasaran Strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten”. Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan ke dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP-1: Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan Indikator:

1. Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/ atau Dunia Kerja;
2. Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/ atau Dunia Kerja;
3. Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya.

SP-2: Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat, dengan indikator:

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang dimanfaatkan oleh Masyarakat;
2. Desa Perikanan Cerdas/ Smart Fisheries Village (SFV) yang menerapkan ilmu dan pengetahuan teknologi hasil kelautan dan perikanan;
3. Percontohan penyuluhan dan pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang diterapkan.

SP-3: Terselenggaranya Tata Kelola yang mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator:

1. Aparatur penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang meningkat kapasitas dan kompetensinya;
2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mendukung penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
3. Sarana dan prasarana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang meningkat kapasitasnya;
4. Lembaga penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang tersertifikasi/ terakreditasi;
5. Hasil pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

SP-4: Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPSDMKP dengan indikator:

1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB).

Berdasarkan Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029, maka pada tahun 2025, BRBIH mendukung SS-4 KKP dengan Sasaran Program (SP)-4 BPPSDMKP. Dalam mendukung SP-4 tersebut, BRBIH mengacu kepada Rencana Kerja KKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2024.

## **B. Rencana Kerja Tahun 2025**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan mengacu kepada Rencana Kerja KKP dan BPPSDM, pada tahun 2025 ditetapkan 1 program kerja pada BRBIH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Program BRBIH Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (RP)
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10.969.977.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>10.969.977.000</b>

Seiring berjalannya kegiatan terdapat beberapa perubahan DIPA, walaupun tidak merubah program dan jumlah pagu anggaran, dilakukan beberapa penyesuaian dalam dukungan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Revisi DIPA

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Bulan pengesahan	2 Desember 2025	-
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	-
	Belanja barang	6.410.000.000	-
	Total	10.969.977.000	
1	Tanggal	2 Desember 2025	21 Februari 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Revisi Blokir Anggaran berdasarkan : surat Sekretaris BPPSMKP Nomor B.2492/BPPSDM.1/RC.420/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Penyampaian Efisiensi Anggaran Lingkup BPPSDM TA 2025	
2	Tanggal	21 Februari 2025	9 April 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Revisi Rekomposisi Blokir Anggaran berdasarkan : surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-327/AG/AG.3/2025 Tanggal 9 April 2025 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.	

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
		Pada revisi ke 2 ini tidak terdapat perubahan pagu per jenis belanja, hanya ada pembukaan blokir belanja gaji PPNPN dan PJLP, belanja langganan daya dan jasa, serta honor keuangan.	
3	Tanggal	9 April 2025	21 April 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA	

### C. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran program dan kegiatan secara optimal dan tepat waktu, pada tahun 2025 disusun Perjanjian Kinerja BRBIH dengan 1 sasaran kegiatan (SK) yang harus dicapai sebelum akhir tahun. Untuk mengukur keberhasilan SK, ditetapkan ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan IK BRBIH pada tahun 2025 berjumlah 9 IK, dengan rincian pada PK sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2025

No	KEGIATAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80
		8	Nilai PNPB Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90

No	KEGIATAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
		BRBIH (Nilai)	

#### D. Pengukuran Kinerja

##### Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRBIH Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, sehingga diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- Adapun status Indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 4. Status Indeks capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Metode pengukuran kinerja**

Metode pengukuran kinerja lingkup BRBIH dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja di lingkup BRBIH yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: 19/BRBIH/RC.610/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Sekretariat BPPSDMKP.



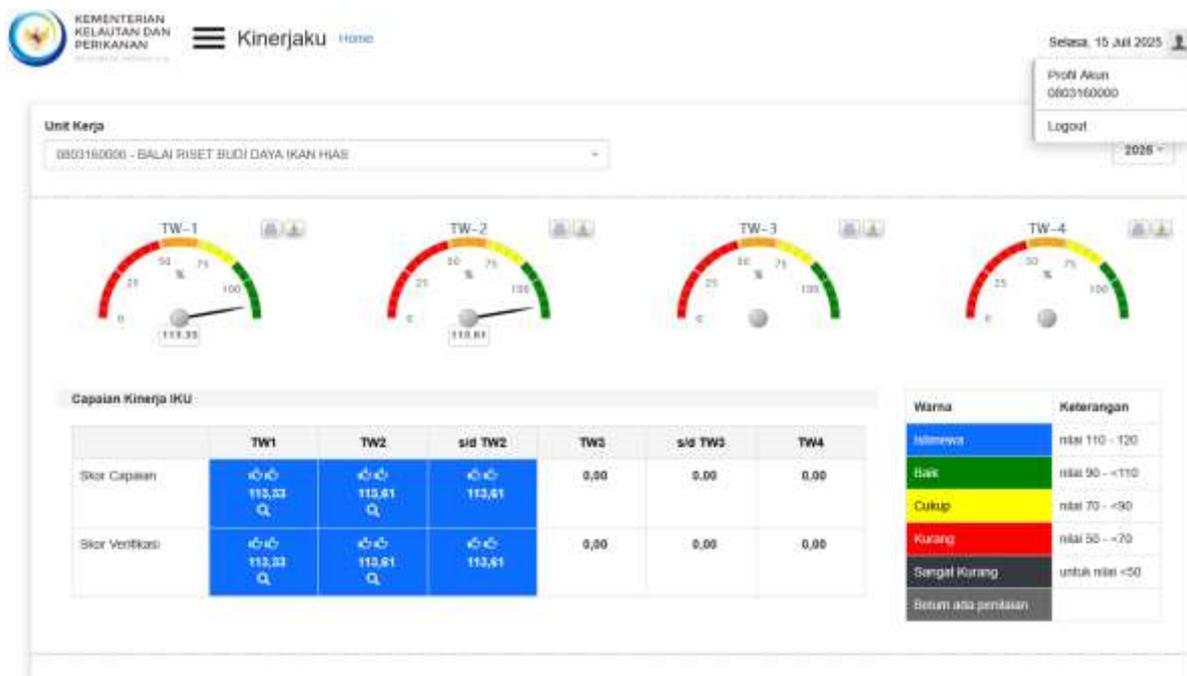
# Bab 3

## Akuntabilitas Kinerja

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IK yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias tahun 2025 dapat tercapai. Pencapaian SK dengan IK tahun 2025 yang mengacu pada *Logical Framework Analisis* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRBIH di tingkat korporat pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 113,61% dengan 3 IK berstatus biru, 2 IK berstatus hijau sebagaimana dashboard kinerjaku berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku BRBIH Triwulan II Tahun 2025

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRBIH. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRBIH yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Tabel 6. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	%	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	85	100,00
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	84	100	119,05
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	81,3	88,62	109,00

No	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	%
6		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	80	100	120,00
7		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	-	-	-
8		Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000	70.000.000	96.874.550	120,00
9		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	-	-	-

### Sasaran Kegiatan 1

### Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

#### Indikator Kinerja 1

#### Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tuntasnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 di BRBIH. Berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDM a.n. Kepala BPPSDM Nomor B.4601/BPPSDM.1/HP.510/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Capaian IKU Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP" capaian atas indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator 1

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK – 1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRBIH (%)										
Realisasi TW II Tahun 2021 - 2024				2025				% Kenaikan 2024 - 2025	Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	% Capaian		Target 2029	% Capaian thd target 2029
		75	100	85	85	85	100,00	-15,00	89	95,51

Data diatas menunjukkan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRBIH mendapat nilai capaian sebesar 85% (100%) dari target 85% dan mengalami penurunan sebesar 15% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I 2024. Penurunan capaian tersebut bukan dikarenakan adanya penurunan kinerja dari tahun 2024 tetapi dikarenakan pada Tahun 2024 BRBIH memiliki 2 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti hingga tuntas seluruhnya dan menghasilkan nilai 100%, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 BRBIH tidak memiliki rekomendasi yang harus di tindaklanjuti sehingga capaiannya sesuai dengan target yaitu 85%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2029) 89, capaian pada triwulan ini baru mencapai 95,51%.

Program/Kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan capaian pada IKM ini yakni Layanan Manajemen Keuangan melalui rutinya pengendalian internal yang dilaksanakan setiap minggunya oleh pimpinan dan penanggung jawab kegiatan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan *briefing* pagi dan sore setiap harinya di masing-masing *cluster* terhadap faktor-faktor yang sekiranya berisiko yang didukung oleh komitmen pimpinan yang selalu terlibat dalam pengawasan internal.

Upaya-upaya dalam rangka pengawalan pencapaian indikator ini misalnya dengan melakukan rapat SPIP bulanan secara rutin untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi, selain itu operator SIDAK yang rutin mengontrol LHP pada aplikasi.

## **Indikator Kinerja 2**

### **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan

menggunakan 3 indikator penilaian yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan rincian variabel sebagai berikut :

Tabel 8. Bobot Nilai IKPA 2025

No	Indikator	Bobot
<b>Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran</b>		
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RDP (halaman III DIPA)	15
<b>Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran</b>		
3	Penyerapan anggran	20
4	Belanja kontraktual	10
5	Penyelesaian tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai IKPA
<b>Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran</b>		
8	Capaian output	25

Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id> dengan kategori nilai IKPA sebagai berikut :

Tabel 9. Kategori Nilai IKPA

No	Nilai IKPA	Kategori
1	$\geq 95$	Sangat Baik
2	$89 \leq \text{Nilai IKPA} < 95$	Baik
3	$70 \leq \text{Nilai IKPA} < 89$	Cukup
4	$< 70$	Kurang

Mengacu penjelasan diatas, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai) Triwulan II 2025 berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025 Tanggal 9 Juli 2025 Perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada data berikut :

Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator 2

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK – 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)										
Realisasi TW II Tahun 2021 - 2024				2025				% Kenaikan 2024 - 2025	Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	% Capaian		Target 2029	% Capaian thd target 2029
94,58	88,52	94,37	99,65	92	84	100	119,05	0,35	92,20	108,46

Data diatas menunjukkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai) Triwulan II Tahun 2025 tercapai 100,00 (119,05%) dari target 84. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,35%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian triwulan ini telah mencapai 108,46 dari target 92,20.

Adapun rincian perbandingan capaian target pada Triwulan II 2025 dan 2024 dapat dilihat pada rincian nilai berikut :

Tabel 11. Rincian Perbandingan Capaian IK IKPA Triwulan II Tahun 2025 dan 2024

Indikator	Tahun/ Nilai		Kenaikan/ Penurunan
	2024	2025	
Revisi DIPA	10	10	-
Deviasi Halaman III DIPA	15	15	-
Penyerapan Anggaran	20	20	-
Belanja Kontraktual	10	-	-
Penyelesaian Tagihan	10	-	-
Pengelolaan UP dan TUP	9,65	10	0,35
Capaian Output	25	25	-

Tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan nilai pada indikator pengelolaan UP dan TUP sebesar 0,35 dan nilai indikator lainnya dapat dipertahankan sejak Triwulan II 2024. Adapun faktor penunjang tercapainya 7 indikator dari 9 indikator ini yaitu komunikasi yang efektif dari Tim Pengelola Keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara dan staf pengelola keuangan) serta koordinasi yang baik dari Tim Pengelola Keuangan dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di lapangan. Salah satu dari bentuk koordinasi yang baik dalam hal ini diantaranya penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang matang

oleh PPK sehingga penyerapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Selain itu, komitmen tim pengelola keuangan dalam melakukan penyelesaian UP/TUP tepat waktu dan sesuai ketentuan juga memberikan kontribusi terhadap tercapainya target IKPA di triwulan ke II ini. Pada tahun 2025 di BRBIH tidak terdapat belanja kontraktual sehingga pada indikator belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan tidak mendapat nilai sehingga hanya dihitung pada 7 indikator lainnya.

Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IK ini yaitu berupa Layanan Manajemen Keuangan dengan melaksanakan internalisasi penyelarasan antara target Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran serta pengajuan SPM GUP/TUP tepat waktu, evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran dan penginputan progres capaian realisasi output pada aplikasi SAKTI tepat waktu. Nilai ini diharapkan dapat terus dipertahankan sampai dengan akhir tahun 2025, sedangkan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan nilai IKPA ke depan antara lain:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L.
2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
3. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai.
4. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.
5. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.
6. Mengikuti kegiatan lintas unit untuk sinkronisasi kegiatan layanan keuangan.

7. Penguatan SDM melalui kegiatan pelatihan dan bimtek pengelolaan keuangan.

### **Indikator Kinerja 3**

#### **Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (Nilai)**

Indikator ini mengukur kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja yang diselenggarakan oleh BRBIH. Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian nilai PM SAKIP BRBIH pada tahun 2025 adalah 81,5 dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Indikator ini baru akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2025, meskipun demikian kegiatan yang mendukung agar tercapainya IK ini telah dilaksanakan sejak awal Tahun 2025 dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja, Manual IK, Pohon IK, Rencana Aksi, Rincian Target IK, DIPA, RKA-K/L, Matriks Peran Hasil (MPH), SK Tim LKj dan SK Tim SAKIP yang kemudian dipublikasikan melalui website BRBIH agar mudah di akses oleh publik sebagai salah satu kriteria penilaian SAKIP yang harus terpenuhi, selain itu juga telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola SAKIP BRBIH melalui pelatihan SAKIP yang diselenggarakan oleh KKP.

Pada tanggal 10-12 Juni 2025 telah dilakukan Penilaian Mandiri yang berlokasi di BRBIH Depok bersama dengan verifikator dari Sekretariat BPPSDMKP, nilai yang diperoleh BRBIH adalah sebesar 84.25 (A) dengan rincian nilai sebagai berikut :

Tabel 12. Rincian Komponen Penilaian SAKIP BRBIH

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	26,10
3	Pelaporan Kinerja	15	13,35
4	Evaluasi Internal	25	20,50
Total Nilai			84.25
Predikat			A

## Indikator Kinerja 4

### Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot dan kategori pada masing-masing indikator sebagaimana berikut :

Tabel 13. Bobot Variabel Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)

No	Variabel	Uraian	Bobot
1	Efektivitas (75)	Capaian RO	75
2	Efisiensi (25)	Penggunaan SBK	10
		Efisiensi SBK	15

Tabel 14. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Kategori	Nilai KPA
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	> 80-90
3	Cukup	> 60-80
4	Kurang	< 50

Indikator ini baru akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV 2025 dengan target yang harus dicapai sebesar 71,5. Sementara itu hingga Triwulan II 2025 rangkaian kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dimulai dari melakukan monitoring realisasi anggaran setiap layanan agar tidak melebihi indeks Satuan Biaya Keluaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta melaporkan Progres Capaian Realisasi Output (PCRO) setiap bulannya.

## **Indikator Kinerja 5**

### **Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)**

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui gambaran indeks profesional ASN lingkup BRBIH yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal KKP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Berdasarkan peraturan tersebut, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas setiap tahunnya.

Sesuai dengan surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 terdapat penyesuaian formula perhitungan untuk IP ASN BKN, berdasarkan surat tersebut penilaian IP ASN KKP pun ikut menyesuaikan. Pada dimensi kompetensi mengalami penyesuaian sebagai berikut :

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN												
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI	
		HASIL PENILAIAN KINERJA					Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	≥20 JP	< 20JP
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang								
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsional

Gambar 6. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2025

Sedangkan pada indikator Kualifikasi tahun 2025 mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki sebagai berikut :

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	25	20	10	10	10
Jabatan Administrator	25	25	20	10	10	5
Jabatan Pegawai	25	25	25	20	10	10
Jabatan Fungsional(keterampilan)	25	25	25	25	20	10
Jabatan Fungsional(keahlian)	25	25	20	10	10	10
Jabatan Pelaksana	25	25	25	25	20	10

Gambar 7. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025

Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja sebagai berikut :

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

Gambar 8. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDMAO KKP dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Adapun penilaian IP ASN tersebut meliputi 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%) dan Disiplin (5%) dengan pengkategorian sebagai berikut :

Kategori	Nilai
Sangat Tinggi	91 - 100
Tinggi	81 - 90
Sedang	71 - 80
Rendah	61 - 70
Sangat Rendah	0 - 60

Gambar 9. Kategori Nilai IP ASN

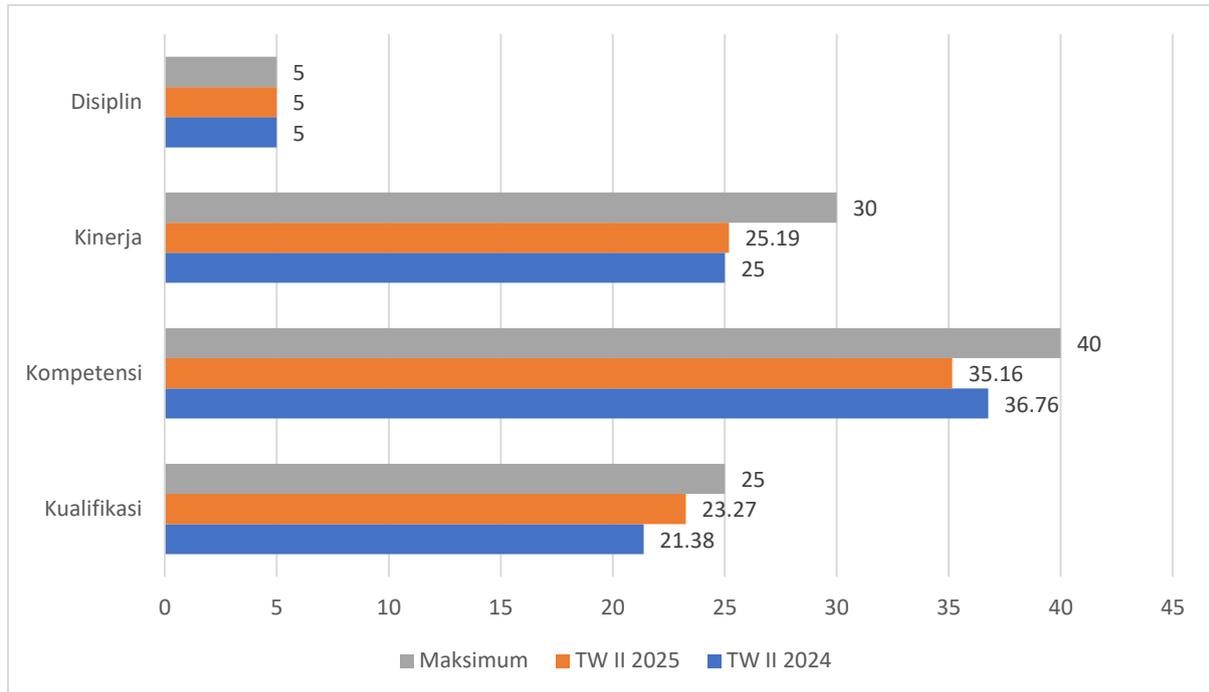
Sesuai dengan Surat Sekretaris BPPSDM a.n. Kepala BPPSDM Nomor B.5458/BPPSDM.1/TU.210/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal Capaian IP ASN Semester I Tahun 2024, Capaian IP ASN BRBIH Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Indikator 5

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK – 5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)										
Realisasi TW II Tahun 2021 - 2024				2025				% Kenaikan 2024 - 2025	Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	% Capaian		Target 2029	% Capaian thd target 2029
66,70	73,78	82,14	88,14	82	81,30	88,62	109,00	0,54	85,00	104,26

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai IP ASN BRBIH Triwulan II tahun 2025 tercapai sebesar 88.62 (109 %) mengalami kenaikan sebesar 0,54 % dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024, sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian ini telah mencapai 104,26 %. Adapun rincian nilai IP ASN BRBIH Triwulan II tahun

2025 dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 10. Rincian Perbandingan Hasil Penilaian IP ASN BRBIH Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Nilai Maksimum berdasarkan Dimensi Penilaian

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat dan dijelaskan alasan peningkatan nilai empat dimensi pengukuran IP ASN BRBIH Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Dimensi Disiplin** bernilai 5 sejak Triwulan II 2024, hal ini dikarenakan tidak adanya pegawai yang terkena hukuman disiplin.
- 2. Dimensi Kinerja** mengalami kenaikan sebesar 0,19 dari Triwulan II Tahun 2024. Kenaikan ini didukung oleh kenaikan nilai kinerja Kepala BRBIH yang pada Tahun 2024 bernilai Baik (25) dan menjadi Sangat Baik (30) di Tahun 2025.
- 3. Dimensi Kompetensi** mengalami penurunan sebesar 1,6 dari Triwulan II Tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan formula penilaian berupa penambahan indikator “kinerja” pada dimensi kompetensi sehingga terjadi penyesuaian pembobotan pada indikator lainnya. Pada indikator “kinerja” hanya kepala BRBIH yang bernilai sangat baik (25),

sedangkan pegawai lainnya bernilai Baik (20) sehingga nilai pada dimensi kompetensi hanya kepala BRBIH yang dapat mencapai nilai maksimal senilai 40 (empat puluh) sedangkan pegawai lainnya hanya dapat memperoleh nilai 35 (tiga puluh lima) yang menyebabkan penurunan capaian pada dimensi ini.

**4. Dimensi Kualifikasi** mengalami peningkatan nilai sebesar 1,89 dari Triwulan II Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya reformulasi pembobotan nilai dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal terhadap jenis jabatan yang diduduki. Pada jabatan pelaksana yang memiliki pendidikan S1 mendapat peningkatan nilai menjadi 25, dan terdapat 3 pegawai yang telah melakukan pencantuman gelar S1 sehingga menambah jumlah pegawai berpendidikan S1, sedangkan pada Tahun 2024 yang dapat memperoleh nilai 25 hanya pegawai yang memiliki pendidikan S3. Pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional akan memperoleh nilai 20 jika pendidikan yang dimilikinya sama dengan minimal pendidikan yang harus dimiliki pada jabatan tersebut.

Faktor pendukung tercapainya kinerja IP ASN di dorong oleh adanya nota dinas Nomor 15/BRBIH/KP.510/III/2025 Tanggal 6 Maret 2025 Perihal Pemenuhan IP ASN yang berisi himbauan kepada seluruh ASN untuk mengikuti diklat 20 JP dan Diklat Teknis serta menjaga selalu kedisiplinan. Tidak hanya itu, dengan adanya monitoring rutin terhadap progress capaian untuk mengetahui ASN yang belum mencapai targetnya juga turut mendukung tercapainya target pada Triwulan II 2025.

Program/Kegiatan penunjang keberhasilan tercapainya target Indikator Kinerja ini yaitu Kegiatan Layanan Manajemen SDM melalui pengembangan kompetensi ASN antara lain Partisipasi dalam diklat teknis dan diklat 20 JP melalui elearning KKP dan keikutsertaan dalam kegiatan seminar atau webinar.

Sementara itu untuk terus meningkatkan capaian pada indikator kinerja ini BRBIH telah melakukan beberapa kegiatan/program berikut:

- a. Mendorong seluruh pegawai untuk selalu mengikuti seminar dan diklat sebanyak 20 JP atau lebih setiap tahunnya untuk memenuhi dimensi kompetensi.
- b. Mendorong pegawai yang sedang tugas belajar/izin belajar untuk segera menyelesaikan pendidikannya guna untuk pencantuman gelar agar nilai pada dimensi kualifikasi dapat meningkat.
- c. Tetap melakukan upaya penegakan disiplin melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung dan melalui sosialisasi tentang disiplin pegawai kepada seluruh pegawai BRBIH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang memuat kewajiban dan larangan bagi PNS.
- d. Pendampingan penyusunan SKP dan pemantauan capaian kinerja individu.
- e. Monitoring kepatuhan jam kerja dan kehadiran pegawai.
- f. Selalu rutin melaksanakan evaluasi kinerja periodik sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

### **Indikator Kinerja 6**

#### **Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

Sementara Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

BRBIH telah mengumumkan seluruh pagu pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Bulan Januari 2025, kemudian pada Bulan Maret pasca adanya efisiensi anggaran terdapat beberapa penyesuaian terhadap pagu pengadaan yang di umumkan melalui aplikasi SIRUP sesuai dengan surat dari Plt Kepala Biro PBJ KKP Nomor B.873/SJ.6/RC.420/III/2025 Tanggal 4 Maret 2025 perihal Upaya Optimalisasi Perencanaan PBJ (RUP Terumumkan TA 2025) pasca pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran. Penyesuaian pagu anggaran terumumkan juga telah dilakukan penyesuaian pada aplikasi SIRUP pasca pembukaan blokir anggaran di bulan April 2025.

Merujuk pada penyesuaian pagu tersebut maka capaian BRBIH berdasarkan Nota Dinas Nomor 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 Tanggal 9 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris BPPSDM a.n. Kepala BPPSDM Nomor B.4633/BPPSDM.1/PL.410/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025

Perihal Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II TA. 2025 dapat dilihat data berikut :

**Tabel 16. Capaian IK 6**

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK – 1 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)										
Realisasi TW II Tahun 2021 - 2024				2025				% Kenaikan 2024 - 2025	Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	% Capaian		Target 2025	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	80	80	100	125,00	-	84	119,05

Indikator Persentase RUP PBJ ini merupakan IK baru pada Tahun 2025 sesuai yang menjadi IK mandatory dari BPPSDMKP sebagai salah satu upaya untuk menjaga transparansi rencana pengadaan barang dan jasa level UPT. Sesuai data di atas dapat dilihat bahwa BRBIH memperoleh realisasi capaian sebesar 100% dari target 80% (persentase capaian kinerja 120%) pada Triwulan II ini, dikarenakan merupakan IK baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2029) capaian tahun ini telah tercapai sebesar 119,05 %.

Faktor penentu keberhasilan tercapainya IK ini antara lain :

1. Aktif melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian yang ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025.
2. Mengumumkan seluruh pagu pengadaan di BRBIH melalui aplikasi SIRUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Kegiatan/Program yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung capaian kinerja yaitu Kegiatan Layanan Umum melalui identifikasi seluruh belanja yang wajib di umumkan dalam SIRUP, penunjukan operator SIRUP BRBIH serta pemutakhiran atau revisi data RUP secara berkala

dan melaksanakan monitoring status pengumuman RUP oleh PPK dan KPA BRBIH.

## Indikator Kinerja 7

### Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)

Indikator Kinerja ini menggambarkan Tingkat Kepatuhan dalam Pengelolaan BMN di BRBIH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator ini merupakan indikator dengan target tahunan dengan target yang harus di capai pada akhir tahun sebesar 80 (delapan puluh) dengan polarisasi *maximize*. Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%) diukur berdasarkan hasil evaluasi dengan parameter yang telah ditetapkan berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
  - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)
  - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/ atau penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%);
6. Penyusunan/ Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).

Berdasarkan parameter penilaian tersebut, selama Triwulan II 2025 BRBIH telah melaksanakan kegiatan berupa :

1. Persiapan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2025;
2. Penyusunan Laporan Bulanan BMN;
3. Penyusunan Laporan Bulanan Barang Persediaan;
4. Inventarisasi Bulanan terkait Pemanfaatan BMN;
5. Pemenuhan dokumen RKBMN Tahun 2025 yang di manfaatkan untuk menyusun RKAKL Tahun 2027.
6. Inventarisasi asset untuk kemudian dilakukan penghapusan bagi yang kondisinya rusak berat;
7. Melakukan proses usulan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Negara yang telah diidentifikasi.

## **Indikator Kinerja 8**

### **Nilai PNBPN Satker BRBIH (Rupiah)**

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak, pedoman umum PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 tahun 2015 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 tahun 2021 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Obyek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber

Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Adapun PNBP BRBIH pada Tahun 2025 ini bersumber dari "Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, dan Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya"

Berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDM a.n. Kepala BPPSDM Nomor B.4602/BPPSDM.1/KU.340/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Laporan Final Capaian Kinerja PNBP Triwulan II Tahun 2025 Lingkup BPPSDM sebagaimana data capaian pada tabel berikut :

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja 8

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK – 1 Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)										
Realisasi TW II Tahun 2020 - 2023				2025				% Kenaikan - an 2024 - 2025	Target Jangka Menengah	
20 21	20 22	2023	2024	Target 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II 2025	% Capaian		Target 2029	% Capaian thd target 2029
		9.080.000	41.717.525	210.000.000	70.000.000	96.874.550	138,39	132,22	255.256.313	37,95

Jika dilihat pada tabel diatas capaian BRBIH mencapai Rp. 96.874.550,- atau 138,39% atau 120% jika dituangkan pada aplikasi kinerjaku dari target TW II dan 37,95% dari target jangka menengah (Tahun 2029), Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 132,22%. Kenaikan capaian tersebut salah satunya disebabkan oleh telah terbitnya PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, pada PMK tersebut telah ditetapkan jenis PNBP untuk komoditas magot, sehingga BRBIH telah dapat menjual magot dan produk turunannya. Selama triwulan II BRBIH telah menyetorkan PNBP yang bersumber dari penggunaan sarpras sesuai tusi berupa sewa kolam sebanyak 15 unit kepada pihak ketiga, sewa ruangan serta penjualan ikan hias.

Faktor penentu keberhasilan atas tercapainya target pada tahun ini diantaranya :

1. Telah dilaksanakan pemasaran hasil produksi melalui komunitas ikan;
2. Kerja sama dengan mitra dan *stakeholder*;
3. Pengelolaan produksi ikan hias yang lebih efisien;
4. Penyelenggaraan kegiatan Eduwisata dan kunjungan instansi;
5. Rapat tim PNBP dalam menentukan strategi pencapaian target.

Adapun setoran PNBP BRBIH sampai dengan Triwulan II ini bersumber dari :

1. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp 44.772.480,- yang bersumber dari setoran sewa kolam.
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp 16.750.070,- yang bersumber dari setoran sewa lahan dan bangunan (lapangan bola, aula dan tanah aliran sungai).
3. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar Rp 35.352.000,- yang bersumber dari hasil setoran penjualan ikan dan magot.

Kegiatan/Program yang telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya indikator ini yaitu Layanan Perkantoran dengan kegiatan berupa :

1. Optimalisasi lahan yang tersedia untuk kegiatan produksi baik ikan hias maupun magot;
2. Optimalisasi layanan penjualan dan sewa melalui kegiatan promosi dan kerja sama;
3. Memperbaiki sarana dan prasarana terkait produksi agar dapat digunakan secara optimal.

## Indikator Kinerja 8

### Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)

Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai) merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. Prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi maximize.

Indikator Kinerja ini memiliki target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2025 sebesar 90 (sembilan puluh) dengan polarisasi *maximize*. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya target tersebut yaitu dengan mengumumkan Informasi Wajib Berkala berupa:

1. Informasi tentang Profil Unit Organisasi (Deskripsi Tugas dan Fungsi, Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara, Mengumumkan Informasi Jumlah dan Prosentase yang wajib LHKSN)
2. Informasi Program dan Kegiatan Organisasi (Mengumumkan Program atau Kegiatan Tahun 2025, Program dan Kegiatan Tahun 2024, Realisasi Kegiatan dan Capaian Kinerja)
3. Informasi Keuangan (Mengumumkan Laporan Keuangan Tahun 2024 : LRA, Neraca, CALK, Daftar Aset dan Investasi, Mengumumkan Informasi Keuangan Tahun 2024 : DIPA, RKA-KL, Realisasi Penyerapan Penggunaan Anggaran)
4. Pengadaan Barang dan Jasa (Mengumumkan rencana umum pengadaan, Mengumumkan dua paket tertinggi pengadaan), Selain itu mengumumkan informasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan

Daftar Informasi yang Dikecualikan, Informasi Tersedia Setiap Saat & Pengadaan Barang dan Jasa, Dokumen Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga, Dokumen Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Unit Organisasi, Menyediakan Dokumen Kepegawaian, Menyediakan Dokumen Pengaduan, Menyediakan Data Akses Informasi Publik, Sarana dan Prasarana, Daftar Informasi Publik Online, Permintaan Informasi Online, Pengajuan Keberatan Online, Menyediakan Audio Visual yang Menayangkan Layanan Informasi, Meja Layanan Informasi (Ruang Layanan, Formulir, Sarana Pendukung, Maklumat, Survey Kepuasan, SOP PPID, Petugas Layanan), Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, Menyediakan Legalitas PPID Pelaksanaan, Menetapkan Kebijakan Pembinaan Pelayanan, Penandatanganan Komitmen Bersama, Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan, Evaluasi dan Monitoring Pembinaan Kebijakan Informasi Publik, Menyediakan Anggaran Rutin Kegiatan Layanan dan bagi peningkatan kapasitas SDM, Penyampaian Informasi Publik melalui Media Sosial dan Inovasi Layanan Publik

Seluruh dokumen yang merupakan Informasi publik dapat diakses melalui website KKP, sedangkan untuk kebutuhan penilaian keterbukaan informasi publik pada LKE dapat diakses melalui G-Drive.

## **B. Realisasi Anggaran**

Alokasi pagu tahun 2025 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada BRBIH adalah sebesar Rp. 10.969.977.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 3.835.054.694,- atau 34,96% dari pagu anggaran Rp. 10.969.977.000,- (pagu dengan blokir). Jika pagu blokir sebesar Rp. 3.208.461.000,- tidak diperhitungkan maka persentase realisasinya menjadi 49,41% dari pagu Rp 7.761.516.000,-. Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan per sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18. Pagu dan realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	BLOKIR (Rp)	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI (Rp)	% THD PAGU	% THD PAGU EFEKTIF
Belanja Pegawai	4.559.977.000		4.559.977.000	2.200.119.346	48,25	48,25
Belanja Barang	6.410.000.000	3.208.461.000	3.201.539.000	1.634.935.348	25,51	51,07
Total	10.969.977.000		7.761.516.000	3.835.054.694	34,96	49,41

Tabel 19. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Triwulan II Tahun 2025

NO	KEGIATAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU	PAGU EFEKTIF	REALISASI	% THD PAGU	% THD PAGU EFEKTIF	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	20.000.000	3.290.000	1.993.000	9,97	60,58
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)					
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	20.000.000	-	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	22.000.000	6.395.000	2.123.000	9,65	33,20
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	30.000.000	3.200.000	1.298.800	4,33	40,59
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	30.000.000	3.665.000	3.664.944	12,22	100,00
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)					
		8	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	10.749.977.000	7.741.766.000	3.823.709.258	35,57	49,39
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH	98.000.000	3.200.000	2.265.692	2,31	70,80

NO	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU	PAGU EFEKTIF	REALISASI	% THD PAGU	% THD PAGU EFEKTIF
		(Nilai)					
<b>Total</b>				7.045.909.000	3.835.054.694	34,96	49,41

Pada tahun 2025, sumber dana yang diterima BRBIH berasal dari rupiah murni (RM). Sumber dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai capaian 9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam 1 Sasaran Kegiatan. Selama Tahun Triwulan II 2025 terdapat 2 (dua) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2025

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Bulan pengesahan	2 Desember 2025	-
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	-
	Belanja barang	6.410.000.000	-
	Total	10.969.977.000	
1	Tanggal	2 Desember 2025	21 Februari 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Revisi Blokir Anggaran berdasarkan : surat Sekretaris BPPSMKP Nomor B.2492/BPPSDM.1/RC.420/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Penyampaian Efisiensi Anggaran Lingkup BPPSDM TA 2025	
2	Tanggal	21 Februari 2025	9 April 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Revisi Rekomposisi Blokir Anggaran berdasarkan : surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-327/AG/AG.3/2025 Tanggal 9 April 2025 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Pada revisi ke 2 ini tidak terdapat perubahan pagu per jenis belanja, hanya ada pembukaan blokir belanja gaji PPNPN dan PJLP, belanja langganan daya dan jasa, serta honor keuangan.	

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
2	Tanggal	9 April 2025	21 April 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA	

Secara umum kinerja penyerapan anggaran BRBIH selama Triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan dapat tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan rencana operasional kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



# BAB 4

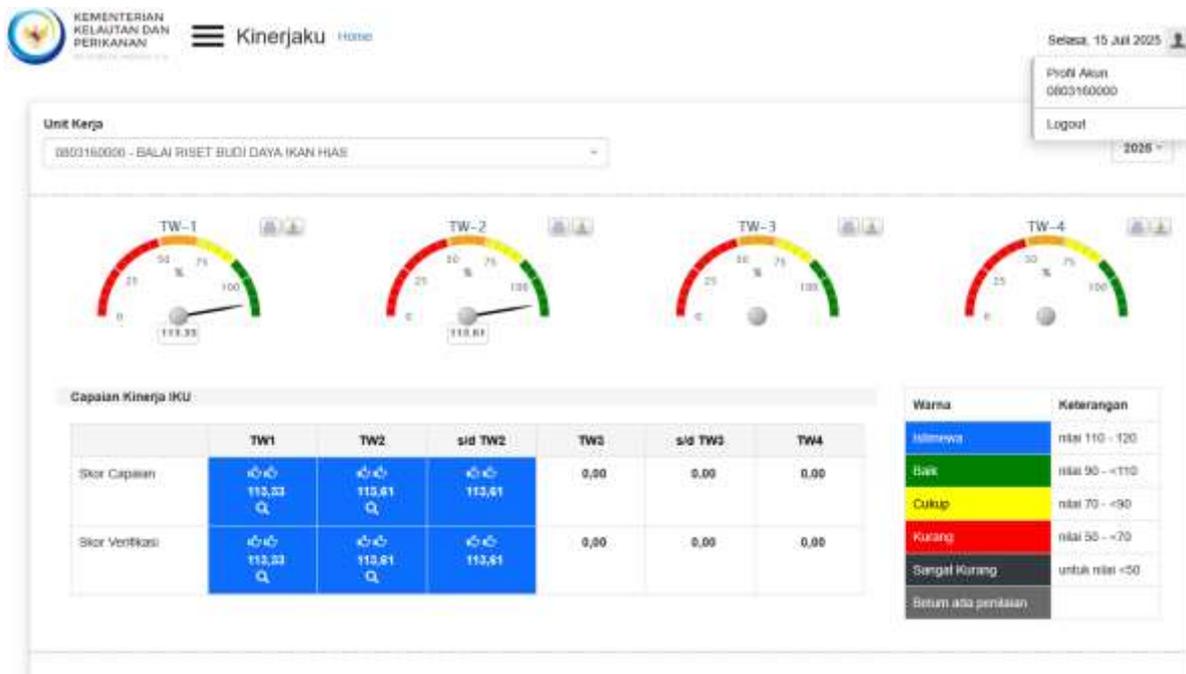
## Penutup

# IV. PENUTUP

## A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, BRBIH memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Kegiatan dan 9 Indikator Kinerja. Triwulan II Tahun 2025 terdapat 5 IK yang dilakukan pengukuran, dengan 3 IK berstatus biru dan 2 IK berstatus hijau, dengan 4 IK lainnya baru akan diukur pada triwulan mendatang dan akhir tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja BRBIH pada tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama, *key performance indicator* (KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRBIH pada triwulan ini sebesar 113,61%, sebagaimana *dashboard* kinerjaku berikut:



Gambar 9. Dashboard Kinerjaku BRBIH level 3 BRBIH

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 21. Capaian Kinerja BRBIH Triwulan II 2025

No	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	%	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	85	100,00
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	84	100	119,05
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	81,3	88,62	109,00
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	80	100	120,00
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	-	-	-
		8	Nilai PNBPN Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000	70.000.000	96.874.550	120,00
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90	-	-	-

## B. Permasalahan dan Rekomendasi

Pada Triwulan II 2025, kinerja BRBIH dapat tergolong baik, namun demikian secara umum masih terdapat permasalahan yang berpotensi untuk menghambat capaian kinerja di triwulan berikutnya, beberapa permasalahan berdasarkan sasaran kinerja utama beserta rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Nilai IP ASN maksimal yang mungkin dicapai sesuai dengan perubahan formula pengukuran IP ASN di tahun 2025 sebesar 88,65 belum

tercapai dikarenakan masih ada ASN yang belum memenuhi 20JP pada komponen penilaian kompetensi. Untuk mengantisipasi tidak tercapainya nilai maksimal tersebut, maka direkomendasikan kepada bagian kepegawaian untuk menghimbau ASN BRBIH yang belum memenuhi 20JP untuk mengikuti kegiatan Diklat dan melakukan upload sertifikat Diklat pada website MyASN.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRBIH. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH. Akhirnya, BRBIH berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



# Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

JALAN PERIKANAN NOMOR 13 PANCORAN MAS DEPOK 16436  
TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973  
LAMARAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [brbihdepok13@gmail.com](mailto:brbihdepok13@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS  
NOMOR: 19/BRBIH/RC.610/I/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)  
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan uraian tugas serta penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias TA. 2025;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas dan telah memenuhi syarat;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diperlukan rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias mengenai Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

- 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
  6. Surat Pengesahan DIPA Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: SP DIPA-032.12.2.403830/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
  7. Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias dengan Kepala Pusat Riset Perikanan KKP TA. 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab :  
 Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2025;
  - b. Ketua Tim Penyusun:  
 Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) BRBIH TA. 2025, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab Tim Penyusun LKJ;

- c. Anggota Tim Penyusun:  
Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja BRBIH TA. 2025;
- d. Sekretariat :  
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2025 lingkup BRBIH.
- e. Kontributor:  
Menyampaikan data dan informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan kinerja (LKj)

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Pengguna Anggaran



HARYADI D

Tembusan:

1. Sekretaris BPPSDM KP;
2. Pegawai yang bersangkutan.

- 4 -

Lampiran SK  
Nomor : 19/BRBIH/RC.610/1/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Penanggung Jawab	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
2	Ketua Tim Penyusun	Sub Bagian Umum
3	Anggota Tim Penyusun	1. Subkoordinator Kelopak Tata Operasional 2. Subkoordinator Kelompok Tata Usaha 3. Subkoordinator Kelompok Pelayanan Teknis
4	Sekretariat	1. Shella Savitri 2. Iswahyudi 3. Susiyanti 4. Yuni Setyowati 5. Ipan Dahniar
5	Kontributor	1. Ifana Agustina 2. Fitri Rahmawati 3. Dewinta Hesti Widyastantri

Ditetapkan di Depok  
pada Tanggal 2 Januari 2025  
KEPADA PEGUNA ANGGARAN



Tembusan:

1. Sekretaris BPPSDM KP;
2. Pegawai yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [hpsdrm@kkp.go.id](mailto:hpsdrm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joni Haryadi**

Jabatan : Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
Rudi Alek Wahyudin ✓

Pihak Kesatu  
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

  
Joni Haryadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80
		8.	Nilai PNBPN Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000
		9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90

**Data Anggaran :**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10,969,977,000
<b>Total Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun 2025</b>		<b>10,969,977,000</b>

Jakarta, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
Rudi Alek Wahyudin ✓

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

  
Joni Haryadi



# BRBIH

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Jl. Perikanan Raya No.13, Pancoran  
MAS, Kec. Pancoran Mas, Kota  
Depok, Jawa Barat 16436

---